

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG

Sejak pasca Perang Dunia Kedua yang kemudian disusul dengan berakhirnya Perang Dingin yang disimbolkan robohnya Tembok Berlin tahun 1989 dan runtuhnya negara adidaya Uni Soviet sebagai pesaing Amerika Serikat, telah mengubah cara pandang dunia politik internasional yang mulanya terfokus pada isu-isu *high politics* menjadi pada isu-isu *low politics*, sehingga masyarakat dunia pun makin mempunyai harapan besar akan datangnya perdamaian dunia yang abadi. Sejak itu pula terjadi pergeseran pandangan mengenai konsepsi pertahanan dan keamanan pada masing-masing negara di dunia. Perang dianggap sebagai sesuatu yang usang (*old-fashioned*), kemudian lahirlah isu baru globalisasi yang dipandang lebih membawa muatan misi ekonomi dan terlepas dari persoalan politik maupun militer. Realitanya dinamika hubungan internasional menunjukkan semakin meningkatnya dimensi kerjasama hubungan antar negara dibanding dimensi konfliknya.

Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan transportasi telah membawa dampak yang dahsyat dalam hubungan antar bangsa khususnya dalam hubungan ekonomi internasional. Perkembangan ini mampu menembus dinding-dinding geopolitik antar bangsa yang menciptakan pergaulan antar bangsa menjadi sangat terbuka. Sangatlah tidak mungkin bagi suatu negara yang benar-benar dapat mandiri, tapi satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi.

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Sehingga integrasi ekonomi regional dan bahkan integrasi ekonomi global merupakan fenomena yang diterima sebagai bentuk kerjasama internasional bagi setiap negara bangsa. Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda, namun kebanyakan

interaksi kerja sama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama.¹

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Korea (Korea Selatan) terbentuk sejak terjalinnya pembukaan diplomatik kedua negara yang terjadi pada tahun 1966 yang dan terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam berbagai bidang.² Sejak hubungan bilateral dibuka pada tahun 1966 hubungan kedua selalu berjalan di segala bidang dan hampir tidak ada masalah yang berarti. Selain menjaga hubungan baik pada tingkat bilateral, kedua negara juga menjalin kegiatan saling memberikan dukungan pada berbagai forum regional maupun internasional.

Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia dan Korea Selatan berada dalam posisi yang saling melengkapi, yakni kedua negara tersebut berpotensi untuk mengisi satu sama lain. Tercermin dalam kondisi masing-masing negara yang masih membutuhkan negara lainnya untuk melengkapi kebutuhan dalam negerinya. Di satu pihak, Indonesia memerlukan modal/investasi, teknologi dan produk-produk teknologi. Di lain pihak, Korea Selatan memerlukan sumber alam/mineral, tenaga kerja dan pasar Indonesia yang besar. Disamping itu, bagi Indonesia, Korea Selatan merupakan alternatif sumber teknologi khususnya di bidang *heavy industry*, IT dan telekomunikasi.³ Hubungan bilateral yang baik di antara kedua negara telah terjalin sejak lama, bahkan dalam forum regional kerjasama ini semakin nyata dengan berdirinya forum kerjasama ASEAN+3 (ASEAN, China, Jepang dan Korea Selatan).

Hubungan bilateral perdagangan dan investasi antar Indonesia dan Korea Selatan cenderung meningkat setelah krisis moneter pada tahun 1997, karena kedua negara saling menunjukkan itikad baiknya untuk mempererat hubungan bilateral, sebagai contohnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Sebelum mengadakan kunjungan ke Korea Selatan telah mengadakan kunjungan ke

¹ K. J. Holsti, *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis (jilid 2)* (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 209-211.

² <http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=68&P=Bilateral&l=id> yang diakses pada tanggal 8 Februari 2010, pukul 21.34 wib.

³ *Ibid.*

Korea Utara untuk menjadi mediator dalam hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Sejak saat itu, Korea Selatan telah menjadi negara tujuan impor keempat terbesar dari Indonesia dan Indonesia menjadi salah satu mitra dagang penting bagi Korea Selatan. Selama tahun 2003, volume perdagangan dua arah Indonesia dan Korea Selatan mencapai 8,6 juta dollar AS dan investasi perusahaan-perusahaan Korea Selatan di Indonesia tercatat sebesar 220 juta dollar AS.⁴

Hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia dan Korea Selatan semakin dekat setelah kedua negara menandatangani beberapa deklarasi kemitraan strategis yang berkembang dengan baik di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kerjasama yang terbentuk antara Indonesia dan Korea Selatan untuk pertama kalinya adalah berupa kerjasama ekonomi dan teknik. Sebagai upaya meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik kedua negara maka pada tanggal 21 April 1971, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan menandatangani sebuah dokumen Kesepakatan Kerjasama Ekonomi dan Teknik yang disebut sebagai *Agreement regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea*.⁵ Kerjasama ini merupakan sebuah persetujuan awal mengenai kerjasama ekonomi dan teknik serta pengembangan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan, yang membuka hubungan kedua negara menjadi lebih erat.

Selama berlangsungnya hubungan kenegaraan yang akrab, kedua negara telah membuat 28 persetujuan antar pemerintah.⁶ Dan banyaknya jumlah persetujuan yang disepakati oleh kedua negara tersebut semakin meningkat tiap dasawarsa. Pada dasawarsa 1970-an, kedua negara hanya menandatangani 2 buah persetujuan. Namun, pada dasawarsa 1980-an, jumlah persetujuan yang ditandatangani oleh kedua negara, meningkat menjadi 6 buah, sedangkan sepanjang dasawarsa 1990-an terdapat 9 persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sepanjang tahun 2000 sampai Februari 2001, kedua negara telah

⁴ Yang Seung-Yoon, *Hubungan Bilateral Korea-Indonesia Pada Era Asia Timur: Sebuah Pembahasan Dalam Perspektif Globalisasi* (Jakarta: FISIP UI Press, 2004), hal. VI.

⁵ http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=11&Itemid=41 diakses pada tanggal 9 Februari 2010, pukul 11.37 wib

⁶ Seung-Yoon, *Op.cit*, hal. 10.

menambah lagi jumlah persetujuan sebanyak 7 buah dan beberapa proyek kesepakatan lainnya untuk kedepannya.⁷

Dengan banyaknya persetujuan antar pemerintah itu, Indonesia menduduki urutan nomor 9 bersama dengan Perancis sebagai negara yang paling banyak melakukan kesepakatan persetujuan dengan Korea Selatan. Posisi ini persis sama dengan posisi dalam hubungan kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan karena baik Korea Selatan maupun Indonesia merupakan salah satu dari 10 mitra dagang terbesar untuk ekspor-impor bagi kedua negara.⁸

Dalam bidang perdagangan, Indonesia berada pada urutan ke 13 sebagai negara tujuan ekspor terbesar bagi Korea Selatan dan Korea Selatan sendiri berada pada urutan ke 10 sebagai negara tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia.⁹ Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Korea Selatan selama periode 2003-2007 memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Selama periode tersebut, total ekspor Korea Selatan ke Indonesia meningkat rata-rata 15,56% per tahun. Total perdagangan bilateral Indonesia-Korea Selatan menunjukkan peningkatan 15,16% per tahun pada periode tahun 2003-2007 atau meningkat dari US\$8,6 miliar pada tahun 2003 menjadi US\$14,88 miliar pada tahun 2007. Indonesia memperoleh surplus sebesar US\$3,34 miliar, yang terdiri dari nilai impor Indonesia di Korea Selatan sebesar US\$9,11 miliar dan nilai ekspor ROK ke Indonesia sebesar US\$5,77 miliar.¹⁰ (Lihat Grafik 1)

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hal. 11.

⁹ Makmur Keliat, *The Future Direction of Defense Cooperation*, hal. 1.

¹⁰ “Perkembangan Perdagangan Indonesia-Korea Selatan Tahun 2008” dalam <http://www.indonesiaseoul.org/indexs.php> diakses pada tanggal 15 Februari 2010, pukul 21.36 wib

Grafik 1.1



Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2008, total perdagangan bilateral Indonesia telah memperlihatkan perkembangan yang sangat signifikan. Walaupun krisis global sedang melanda dunia termasuk Indonesia dan Korea. Namun total perdagangan bilateral kedua negara ini tetap meningkat. Bahkan meningkat mencapai US\$ 19,25 milyar atau naik sebesar 29,36 persen yang terdiri dari ekspor Korea ke Indonesia sebesar US\$ 7,93 milyar dan impor Korea dari Indonesia sebesar US\$ 11,32 milyar. Nilai impor Indonesia ke Korea tersebut memperlihatkan peningkatan sebesar 24,21 persen pada periode Januari – Desember 2008 atau telah melampaui jumlah impor tahun 2007, yakni sebesar US\$ 9,11 milyar, sedangkan ekspor Korea ke Indonesia juga mengalami hal yang sama yakni naik sebesar 37,48 persen menjadi sebesar US\$ 7,93 milyar bila dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun 2008, Indonesia memperoleh surplus neraca perdagangan sebesar US\$ 3,39 milyar atau meningkat sebesar 1,30 persen.¹¹

Hubungan kedua negara ini mengalami peningkatan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini dengan semakin bertambahnya ikatan kerjasama antara kedua negara yang mencakup bidang ekonomi, politik, keamanan,

¹¹ *Ibid.*

perdagangan dan sosial budaya. Dan untuk mendorong dan mempercepat kerjasama ekonomi dan teknik di antara kedua negara, maka Kedua Kepala Negara pada tanggal 4 Desember 2006 dan bertempat di Jakarta, telah menandatangani sebuah Deklarasi Bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Korea dalam rangka Kemitraan Strategis untuk Mendorong Persahabatan dan Kerjasama di Abad ke-21 atau yang lebih dikenal dengan nama *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*.¹²

Kedua negara juga telah berhasil membentuk *Joint Commission Ministerial Level*, yang dilaksanakan di Seoul pada tanggal 8-9 Juni 2006. Pertemuan ini ditujukan untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral kedua negara yang terjalin dengan baik selama ini. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di beberapa bidang antara lain kerjasama di bidang pertahanan, kehutanan, energi dan ilmu pengetahuan, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama di bidang lainnya.

Di bidang pertahanan, Korea Selatan telah menjadi salah satu mitra Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI. Dalam kaitan tersebut Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati kerja sama kegiatan di bidang pertahanan, antara lain melalui nota kesepahaman dan perjanjian di bidang logistik, kerja sama industri serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Indonesia dan Korea Selatan juga telah lama mengembangkan kerja sama pendidikan, antara lain pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan pengembangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertukaran kunjungan pejabat tinggi pertahanan dan militer kedua negara berlangsung cukup baik; ini mengindikasikan bahwa hubungan pertahanan kedua negara semakin penting.¹³ Kerjasama yang terjalin di antara Indonesia dan Korea Selatan telah menghasilkan sejumlah kesepakatan dalam beberapa sektor kerjasama antara lain kerjasama pemberantasan korupsi, *counter-terrorism* dan penanggulangan

¹² *Ibid.*

¹³ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008* (Jakarta: Dephan RI, 2008), hal. 149.

kejahatan transnasional. Di samping itu kedua negara juga menyepakati kerjasama antar parlemen serta kerjasama industri pertahanan melalui *Joint Defense Logistics and Industrial Committee*. Sebelumnya Indonesia dan ROK telah mengikatkan diri dalam perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLACM).¹⁴

Dalam *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*, disebutkan beberapa poin kerjasama di bidang pertahanan yang disepakati kedua negara untuk segera diwujudkan, diantaranya adalah:

- 1) *To hold periodic RI-ROK defense policy talks at the senior official's level for discussion on various areas of defense cooperation between the two countries.*
- 2) *To further increase contacts and exchanges of visits between respective defense official the two countries.*
- 3) *To intensify exchanges in education, training and on-the-job participation between two countries.*
- 4) *To promote and facilitate joint production, high-technology transfer, and other schemes of cooperation between their respective defense industries as well as counter-purchase and joint marketing, and to further advance specific defense industrial cooperation through the Joint Defense Logistics and Industrial Committee (JDLIC).*¹⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi kerjasama antara Departemen Pertahanan dengan *The Ministry of National Defense* (MND) berupa pertemuan tetap rutin dilaksanakan setiap tahun dengan penyelenggaraan secara bergantian, antara lain:¹⁶

- a. *Joint Committee Meeting*, antara Dephan RI dengan mitra Dephan ROK.

¹⁴ www.deplu.go.id, *loc.cit.*

¹⁵ *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century.*

¹⁶ www.deplu.go.id, *loc.cit.*

- b. *Intelligence Exchange*, antara Bais TNI dengan *Korea Defense Intelligence Agency*.
- c. *Army to Army Talks*, antara TNI AD dengan *ROK Army*.
- d. *Navy to Navy Talks*, antara TNI AL dengan *ROK Navy*.
- e. *Airmen to Airmen Talks*, antara TNI AU dengan *ROKAF*.
- f. *Intelligence Meeting* , antara BIN dengan *Korea National Intelligence Service (KNIS)*.
- g. Program pendidikan dan latihan antara kedua negara.
- h. Program seminar dan pameran.
- i. Program kerjasama bidang industri pertahanan.

1.2. PERMASALAHAN

Penandatanganan deklarasi bersama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*, disebutkan beberapa agenda penting yang menjadi fokus perluasan kerjasama bilateral kedua negara, berikut diantaranya adalah:¹⁷

1. *Economic Cooperation*
 - *Cooperation for Trade Liberalization*
 - *Forestry Cooperation*
 - *Tourism Cooperation*
2. *Science and Technology Cooperation*
 - *Nuclear Power Cooperation*
 - *Small and Medium Industry Cooperation*
3. *Political and Security Cooperation*
 - *Anti-Corruption Cooperation*
 - *Security Cooperation*
 - *Defense Cooperation*
4. *Socio-Cultural Cooperation*

¹⁷ The Eminent Persons Group (EPG) The Republic of Indonesia and The Republic of Korea, *Agenda for Cooperation: The EPG Recommendation for Greater Bilateral Cooperation to Follow Up The RI-ROK Joint Declaration on Strategic Partnership*.

- *Establishment of Cultural Centers*
- *Cooperation on Film Production*
- *One Stop Service for Grievances and Complaints*
- *Relaxation of Visa Requirements to Promote Tourism*

Di antara banyaknya kerjasama non-konvensional yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan dalam deklarasi bersama tersebut, ternyata ditemukan sebuah agenda kerjasama konvensional (dalam bidang pertahanan). Dalam situasi dan kondisi politik internasional sekarang ini sebagian besar aktor-aktor yang terlibat konflik akan cenderung menghindari bentuk-bentuk fisik atau konfrontasi dalam penyelesaian konflik, dan lebih mengutamakan adanya dialog serta negosiasi sebagai usaha penyelesaian.

Berdasarkan latar belakang serta celah kesenjangan antara normatif dan empirik tersebut, maka peneliti mengajukan sebuah pertanyaan penelitian: mengapa Indonesia akhirnya memutuskan untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan melalui *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* dan bagaimanakah diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai kepentingan pertahanannya.

I. 3. TUJUAN PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan yang menyebabkan Indonesia untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan. Dan memberikan berbagai temuan yang menunjukkan bahwa melalui *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*, diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan dapat memenuhi kepentingan pertahanan Indonesia.

I. 4. KERANGKA PEMIKIRAN

I. 4. 1. Tinjauan Pustaka

Dalam sub bab ini akan memberikan rangkuman mengenai beberapa tulisan yang membahas mengenai kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain.

Tinjauan pustaka pertama adalah Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, yang merupakan suatu rumusan pernyataan dan kebijakan pertahanan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan negara. Buku ini menjadi media untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertahanan negara kepada masyarakat, baik domestik maupun internasional. Substansi yang dalam Buku Putih tahun 2008 ini adalah pemutakhiran kebijakan pertahanan dalam konteks perubahan yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan fungsi pertahanan negara. Konteks perubahan, seperti yang diuraikan di atas mencakupi dinamika lingkungan strategis, baik global, regional maupun dalam konteks nasional, provinsial, dan lokal. Dalam buku ini dijelaskan mengenai lingkungan keamanan strategis Indonesia, hakikat dan penggolongan ancaman bagi Indonesia, konsepsi pertahanan negara, kebijakan strategis penyelenggaraan pertahanan negara, pembangunan badan pertahanan negara dan anggaran pertahanan negara

Tinjauan pustaka yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Devi Oftasari. Devi Oftasari dalam skripsinya membahas tentang alasan-alasan yang menyebabkan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan kerjasama pertahanan dengan Rusia yang sebelumnya sudah dijalin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, padahal AS telah mencabut kebijakan embargo militernya kepada Indonesia.¹⁸

Dalam penelitiannya, Devi menjelaskan bahwa alasan pemerintah Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan Rusia, yang saat itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah untuk menyeimbangkan politik luar negerinya dengan tidak terlalu bergantung kepada negara Barat, terutama AS.

¹⁸ Devi Oftasari, *Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Rusia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2008).

Hal ini terkait dengan embargo-embargo militer yang pernah dijatuhkan oleh AS kepada Indonesia, sehingga Indonesia tidak ingin merasakan embargo militer serupa terulang kembali. Dengan demikian, kerjasama pertahanan dengan Rusia tetap diteruskan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu peningkatan kerjasama pertahanan dengan Rusia terkait dengan kepentingan nasional Indonesia, yaitu kepentingan pertahanan dan kepentingan ekonomi. Kepentingan pertahanan Indonesia adalah meningkatkan kemampuan militer TNI dengan pengadaan alutsista yang modern. Sedangkan, kepentingan ekonomi termasuk dalam prioritas kebijakan domestik yang harus dipenuhi. Sehingga peningkatan kerjasama dengan Rusia menjadi penting karena termasuk dalam strategi kebijakan luar negeri Indonesia.

Sedangkan tinjauan pustaka ketiga merupakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai investasi asing dari Korea Selatan di Indonesia.¹⁹ Berdasarkan data Korean Exim Bank, investasi ROK di Indonesia untuk tahun 2008 sampai bulan September mencatat jumlah realisasi investasi sebanyak 543 proyek dengan nilai US\$291,7 juta. Dibandingkan tahun 2007, realisasi investasi ROK di Indonesia tahun 2008 diantisipasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan mengingat hingga bulan September 2008, nilai realisasi investasi 2008 telah melebihi nilai realisasi untuk keseluruhan tahun 2007 yang tercatat sebesar US\$245 juta.

Tinjauan pustaka kedua adalah tesis dari Idil Syawfi yang berjudul *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*.²⁰ Dalam penelitiannya, Idil menggambarkan dan menganalisa berbagai kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia selama kurun waktu 2003 hingga tahun 2004. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan baik untuk meningkatkan stabilitas regional serta peningkatan rasa percaya dari negara-negara lain melalui aktifitas *confidence building measures*, untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dengan melakukan aktifitas diplomasi pertahanan dalam

¹⁹ <http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=68&P=Bilateral&l=id> yang diakses pada tanggal 8 Februari 2010, pukul 21.34 wib.

²⁰ Idil Syawfi, *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009).

hal *defense capability*, serta untuk meningkatkan independensi pertahanan dengan melakukan aktifitas diplomasi pertahanan dalam hal *defense industry*. Penelitian tersebut menunjukkan dua fakta, yakni pertama, membuktikan bahwa karakter diplomasi pertahanan Indonesia dalam kurun waktu 2003 hingga 2008 adalah *defense diplomacy for confidence building measures*. Kedua, menunjukkan bahwa keluaran dari diplomasi pertahanan Indonesia dalam kurun waktu tersebut adalah tingginya tingkat stabilitas keamanan regional, dan rendahnya peningkatan kapabilitas pertahanan serta independensi pertahanan Indonesia.²¹

Sektor investasi terbesar ROK di Indonesia adalah sektor manufaktur dengan nilai realisasi US\$149 juta dalam 255 proyek diikuti sektor pertambangan senilai US\$47,4 juta dalam 64 proyek dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan senilai US\$20,1 juta dalam 24 proyek. Adapun berdasarkan persetujuan investasi, nilai investasi ROK di Indonesia untuk jangka waktu yang sama adalah US\$455 juta dalam 333 proyek. Secara kumulatif, total investasi ROK di Indonesia sejak tahun 1968 bernilai US\$5,9 miliar dalam 2.781 proyek investasi. Dengan demikian, secara kumulatif ROK berada pada peringkat pertama investasi asing di Indonesia dari jumlah proyek investasi sedangkan dari sisi nilai investasi berada pada peringkat ke-8.²² Data tersebut menunjukkan bahwa setelah diadakannya *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*, telah memberikan peningkatan yang sangat signifikan bagi pertumbuhan investasi asing di Indonesia, khususnya yang berasal dari Korea Selatan. Sehingga deklarasi bersama tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak.

²¹ *Ibid.*, hal. 129.

²² *Ibid.*

I. 4. 2. Kerangka Teori

Dalam menelaah topik dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, konsep hubungan atau interaksi dan diplomasi pertahanan akan digunakan untuk menganalisis lebih dalam tentang diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan pada periode 2006 hingga 2009.

Gambaran pola hubungan atau interaksi antar negara dibagi oleh Holsti²³ menjadi dua bentuk yaitu konflik dan kerjasama. Ada bentuk interaksi lain yang disebut sebagai situasi yang jatuh diantara dua bentuk itu yakni, persaingan. Hubungan antar negara ditentukan oleh sifat negara dan masyarakat. Konflik adalah kondisi adanya suatu perbedaan pendirian antar kelompok termasuk posisi yang hendak dicapai²⁴. Sedangkan kerjasama atau kolaborasi adalah persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Kerjasama dapat terjadi dalam wadah organisasi dan lembaga internasional. Meskipun dalam kenyataan, kolaborasi yang paling kooperatif pun selalu terdapat konflik didalamnya.²⁵ Kerjasama bukan bermasalah pada identifikasi sasaran-sasaran bersama tapi bagaimana mencapai sasaran-sasaran itu.

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi, bangsa-bangsa yang berada di dunia ini dengan kemajuan teknologi yang pesat mempunyai hubungan satu sama lain yang rumit sifatnya disebabkan oleh adanya proses interaksi. Pada bangsa-bangsa terdapat kegiatan-kegiatan yang kompleks. Kedalam, kegiatan tersebut memiliki tujuan agar bisa mendapatkan kelangsungan hidup, sedangkan keluar kegiatan mengarah ke lingkungan internasional. Dalam perspektif internasional, tingkah laku serta tindakan suatu bangsa merupakan kegiatan yang bersifat timbal balik, yaitu menerima dari dan memberikan kepada lingkungan internasionalnya²⁶.

²³ K.J. Holsti. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), hal. 392 – 394.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hal. 209 – 214.

²⁶ *Ibid.*, hal 157.

Secara sederhana suatu hubungan pertahanan (*defence relationship*) merupakan ikatan jaringan antar dua atau lebih negara melalui angkatan-angkatan bersenjata nasionalnya dan birokrasi badan penelitian, pengembangan dan industri pertahanan dan birokrasi pertahanan. *Defence relationship* merupakan suatu elemen atau subordinat dari hubungan keamanan (*security relationship*). Hubungan keamanan sendiri bersifat luas bukan saja mencakup keamanan tetapi juga perdagangan diplomasi, budaya dan bidang-bidang kehidupan nasional lainnya. Jika *defence relationship* merupakan wilayah kegiatan menteri pertahanan, departemen pertahanan dan angkatan bersenjata maka *security relationship* mencakup ketiga lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pertahanan tersebut juga mencakup departemen-departemen pemerintahan lainnya.²⁷

Negara-negara bangsa akan membangun suatu keterhubungan perahanan untuk berbagai alasan dan hubungan pertahanan antara negara-negara tetangga dirancang untuk tiga hal penting yaitu: menambah pendalaman kekuatan pada pertahanan bangsa dan memperbaiki keamanan regional dan global.²⁸

Konsep lain yang digunakan adalah Diplomasi Pertahanan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama pertahanan antara kedua negara. K.M. Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* menjelaskan pengertian diplomasi, yaitu “Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain”.²⁹

Menurut Louise Diamond,³⁰ diplomasi merupakan proses politik damai antara negara bangsa yang mengharapkan struktur yang dapat membentuk dan mengatur hubungan sistem internasional serta mengakomodasi kepentingan suatu

²⁷ Bigadier A. J. Molan, *The Australian-Indonesian Defence Relationship*, (Canberra: Australian College of Defence and Strategic Studies, August 1997). Hal 3-5 dikutip Ikrar Nusa Bakti, “Bantuan Luar Negeri Australia di bidang keamanan” dalam Adriana Elizabeth (Ed), *Kebijakan Bantuan Luar Negeri Australia kepada Indonesia*. (Jakarta: P2P LIPI, 2004). hal. 62-63.

²⁸ Juwono Sudarsono, *Lingkungan Internasional dari Pertahanan-Keamanan Indonesia dalam Ekonomi, Politik dan Strategi*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 333-334.

²⁹ S.L. Roy, *Diplomasi*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1991), hal. 3.

³⁰ Louise Diamond, *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace, Third Edition* (Connecticut: Kumarian Press, 1996), hal. 26.

negara. Dan dapat dijalankan melalui beberapa jenis instrumen seperti politik, ekonomi, perdagangan, bantuan, hak asasi, kontrol militer, budaya dan peningkatan akademik/pendidikan. R.W. Sterling dalam buku *Macropolitics*, menjelaskan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.³¹

Menurut Morgenthau dalam *Politics Among Nations*,³² ada 3 sarana diplomasi yang amat menentukan: bujukan (*persuasion*), kerjasama (*compromise*) dan ancaman kekerasan (*threat of force*). Untuk mencapai tujuan diplomatiknya, suatu negara menerapkan satu atau kombinasi beberapa prinsip utama diplomasi yaitu *sama* (perdamaian atau negosiasi), *dana* (memberi hadiah atau konsesi), *danda* (menciptakan perselisihan) dan *bedha* (mengancam atau menggunakan kekuatan nyata).³³

Sedangkan *Defense* atau pertahanan merupakan usaha penciptaan keamanan untuk menghadapi ancaman maupun serangan.³⁴ Pengembangan kapabilitas pertahanan perlu untuk dilakukan oleh negara karena kondisi sistem internasional yang bersifat anarki³⁵, sehingga terjadinya serangan yang dilakukan oleh negara satu ke negara lain untuk mencapai kepentingannya menjadi kemungkinan yang tidak dapat dihindari.³⁶

Secara tradisional peran militer atau kekuatan pertahanan ditujukan untuk pertahanan negara baik melalui fungsi-fungsi penangkalan, pertahanan, intervensi militer di masa lalu yang ditujukan untuk menggagal kerjasama strategis atau aliansi atas dasar-dasar pertimbangan politik nyata dan kepentingan pertahanan

³¹ S.L. Roy, *Ibid.*, hal. 5.

³² *Ibid.*, hal. 28.

³³ *Ibid.*, hal. 16.

³⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity* (New Jersey: Prentice Hall, 1997), hal. 346.

³⁵ Kondisi anarki merupakan kondisi dimana tidak terdapat otoritas yang lebih tinggi di atas negara.

³⁶ Robert Jervis, "Cooperation Under Security Dillema", dalam *World Politics*, Vol. 30, No. 2 (Januari 1978), hal. 167-214.

nasional. Saat ini, Diplomasi Pertahanan mencakup pertama, upaya untuk membantu membina hubungan dengan negara-negara bekas musuh dan untuk mengembangkan apa yang disebut CBM (*Confidence Building Measures*). Kedua, Diplomasi Pertahanan juga ditujukan untuk membantu mengembangkan politik atas militer dan pembentukan tata pemerintahan yang baik di bidang pertahanan. Ketiga, Diplomasi Pertahanan juga digunakan untuk memberikan sumbangan kepada upaya-upaya perdamaian dunia seperti misi-misi perdamaian dunia. Diplomasi Pertahanan juga bisa membentuk persepsi bersama tentang suatu masalah dan *mind-set* militer negara lain.

Pada dasarnya kerjasama pertahanan merupakan bagian dari diplomasi pertahanan. Prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama pertahanan harus diperhitungkan oleh pejabat-pejabat yang terlibat di dalam komitmen kerjasama pertahanan kedua negara. Di dalam rumus-rumus hukum diplomatik juga harus mencermati jika ada kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya, seperti tekanan ekonomi dan tekanan politik. Kerjasama pertahanan tidak mengubah kebijakan politik dengan negara lain, dan kerjasama ini dapat menopang upaya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sains dan teknologi, khususnya di bidang industri pertahanan. Selain itu, pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip persamaan terhadap keuntungan bersama, penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara dan dapat bermanfaat baik peningkatan kapasitas dan kemampuan pertahanan Indonesia secara komprehensif.

Menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster diplomasi pertahanan secara tradisional merupakan penggunaan kekuatan persenjataan dan infrastruktur dan instrumen yang mendukungnya sebagai alat dalam kebijakan keamanan dan luar negeri. Dalam sejarahnya, diplomasi pertahanan biasanya dilakukan dalam bentuk kerjasama pertahanan dan bantuan militer, yang merupakan bagian dari *real-politik* internasional dan perimbangan kekuatan untuk membuhi kepentingan nasional. Suatu negara terlibat dalam kerjasama pertahanan, dan menyediakan bantuan kepada negara lain dengan tujuan untuk mengimbangi atau menggentarkan musuh, mengelola perluasan pengaruh, dan mendukung rezim

yang bersahabat dalam menekan lawan politik domestik atau memposisikan kepentingan komersial.³⁷

Konsep ini kemudian berubah semenjak berakhirnya Perang Dingin dimana diplomasi pertahanan merupakan pendayagunaan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata sebagai cara untuk membangun hubungan kerjasama dengan negara lain, dan untuk mendukung negara lain dalam melakukan perbaikan militer. Aktifitas diplomasi pertahanan tidak hanya sebatas pengaturan kerjasama diantara negara-negara anggota pakta pertahanan, namun kerjasama dengan membangun kemitraan dengan negara-negara lainnya.³⁸

Pergeseran makna diplomasi pertahanan saat ini terjadi, dimana kerjasama pertahanan dilakukan untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih luas. Diantaranya pertama, kerjasama dan bantuan militer digunakan untuk membantu pembangunan hubungan yang lebih kooperatif dengan mantan musuh atau musuh potensial, yang disebut *strategic engagement*. Kedua, kerjasama dan bantuan militer digunakan untuk mempromosikan kontrol sipil demokratis sebagai usaha untuk mempromosikan kontrol sipil demokratis sebagai usaha mendukung demokrasi liberal dan tata pemerintahan yang baik. Ketiga, kerjasama dan bantuan militer dilakukan untuk mendukung mitra dalam mengembangkan kapasitasnya agar dapat berkontribusi dalam operasi *peacekeeping* dan *peace-enforcement*.³⁹

Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat tiga variasi dalam perkembangan kajian mengenai diplomasi pertahanan.⁴⁰ Pertama, menurut realisme klasik bahwa diplomasi pertahanan merupakan instrumen untuk pengejaran kepentingan nasional suatu negara yang terbagi ke dalam dua kategori utama yaitu: diplomasi bilateral dan multilateral, diplomasi bilateral memiliki kedalaman yang lebih efektif daripada diplomasi multilateral. Kedua, diplomasi pertahanan secara tradisional yang merupakan alat kebijakan pertahanan dan

³⁷ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (New York: Alfred Knopf, 1948), hal. 6.

³⁸ Andrew Cottey dan Anthony Forster, "Introduction", dalam *Adelphi Papers*, 44:365, (New York: Routledge, 2004), hal. 5-6.

³⁹ *Ibid.*, hal. 7.

⁴⁰ Idil Syawfi, *Ibid.*, hal. 10-11.

keamanan serta luar negeri suatu negara. Serta perkembangan terkini dari diplomasi pertahanan yang dikembangkan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain untuk mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional.

Dalam kata lain diplomasi pertahanan dilakukan, antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan di tingkat global, regional dan bilateral.⁴¹ Dan diplomasi dalam tingkatan bilateral memainkan peranan yang paling dalam.

Menurut Idil Syawfi keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan pembangunan. Namun secara parsial terdapat karakter utama dari diplomasi pertahanan suatu negara :⁴²

1. *Defense diplomacy for Confidence Building Measures*
2. *Defense Diplomacy for defense capabilities*
3. *Defense Diplomacy for Defense industry*

Defense diplomacy for confidence building measures dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, yang utamanya dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar pihak dengan cara saling terbuka dalam kebijakannya, transparansi dalam pengembangan kapabilitas militernya sehingga anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara tidak dianggap ancaman bagi negara lain.⁴³ Hal ini dilakukan karena dengan meningkatnya hubungan yang lebih baik dapat

⁴¹ Andi Widjajanto, "Diplomasi Pertahanan Indonesia-AS", dalam <http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006111312>

⁴² Idil Syawfi, *Ibid.*, hal. 14.

⁴³ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in South East Asia: ASEAN and the Problem of Regional Power* (New York: Routledge, 2001), hal. 66.

menurunkan kemungkinan terjadinya perang.⁴⁴ Penguatan diplomasi pertahanan dalam karakter ini dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya :⁴⁵

- Kerjasama militer dilakukan dalam hal peranan politik, yang merupakan simbol dari keinginan untuk menciptakan kerjasama yang lebih luas, membangun rasa percaya, dan komitmen untuk bekerjasama untuk menghilangkan berbagai perbedaan.
- Diplomasi pertahanan dapat dijadikan sebagai cara untuk membangun persepsi kepentingan bersama.
- Kerjasama pertahanan digunakan untuk merubah *mind-sets* militer dari negara mitra.
- Kerjasama militer dapat digunakan untuk mendukung perbaikan pertahanan dari negara mitra.
- Diplomasi pertahanan dapat mendorong kerjasama dalam bidang lainnya.

Pengembangan hubungan diplomasi yang baik dalam hal *confidence building measures* akan menumbuhkan kondisi moral yang saling mempercayai antar pihak. Secara praktis, diplomasi pertahanan dalam tatanan *confidence building measures* dilakukan dalam hal :⁴⁶

1. Kunjungan kenegaraan
2. Dialog dan konsultasi
3. Saling tukar informasi strategis
4. Pembatasan kapabilitas pertahanan
5. Deklarasi kerjasama strategis
6. Pertukaran perwira
7. Pendidikan militer
8. Kesepakatan hubungan baik
9. Latihan militer bersama

⁴⁴ Richard Ned Lebow, *Coercion, Cooperation, and Ethics in International Relations* (New York: Routledge, 2007), hal. 342.

⁴⁵ Andrew Cottey dan Anthony Fossler, "Chapter 1: Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention", dalam *Adelphi Papers*, 44: 365, (New York: Routledge, 2004), hal. 15-16.

⁴⁶ Idil Syawfi, *Op.Cit.*, hal. 16

Defense diplomacy for defense capabilities, dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara secara material. Peningkatan kapabilitas pertahanan dapat dilakukan dalam tataran internal dan eksternal. Khusus dalam tataran eksternal instrumen diplomasi memainkan peranan penting agar memungkinkan bagi sebuah negara untuk dapat melakukan pembelian senjata bagi kepentingan pengembangan kekuatan pertahanannya dari negara lain.⁴⁷ Diplomasi dalam tataran ini dilakukan semata-mata untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman potensial. Yang dilakukan melalui :⁴⁸

1. Usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer
2. Pembelian alutsista, kredit ekspor
3. Pembangunan pangkalan militer
4. Pemberian *security umbrella* baik yang dilakukan oleh negara *core* ke negara *periphery* maupun sebaliknya.

Defense diplomacy for defense industry merupakan diplomasi yang digunakan dengan tujuan pembangunan maupun penguatan industri pertahanan suatu negara. Hal ini dapat menimbulkan efek independensi politik dan ekonomi serta menurunkan tingkat ketergantungan dalam hal pengadaan alutsista untuk pembangunan kapabilitas pertahanan, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat kerjasama.⁴⁹ Diplomasi pertahanan ini dilakukan dengan cara :⁵⁰

1. Kerjasama strategis antar negara dalam hal produksi senjata.
2. Kerjasama strategis antar negara dalam pengembangan dan penelitian senjata.
3. Pemberian lisensi.
4. Investasi dalam industri pertahanan.

⁴⁷ Ron Matthews, "Introduction: 'Managing' the Revolutions", dalam Ron Matthews dan John Treddnick, *Managing the Revolution in Military Affairs* (New York: Palgrave MacMilan), hal. 1-9.

⁴⁸ Idil Syawfi, *Op.Cit.*, hal. 17.

⁴⁹ Timothy D. Hoyt, *Military Industry and Regional Defense Policy: India, Iraq, Israel* (New York: Routledge, 2007), hal. 8-9.

⁵⁰ Idil Syawfi, *Op.Cit.*, hal. 20.

5. Transfer teknologi.

I. 5. METODE PENELITIAN

I. 5. 1. Hipotesis Penelitian

Hubungan kerjasama pertahanan yang terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan merupakan suatu bentuk hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain (*mutual dependence*). Berdasarkan *framework* dan kerangka teori yang telah disebutkan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

“Kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan merupakan salah satu bentuk diplomasi pertahanan Indonesia untuk tujuan peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia dan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia terhadap Korea Selatan semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara.”

I. 5. 2. Metodologi Penelitian

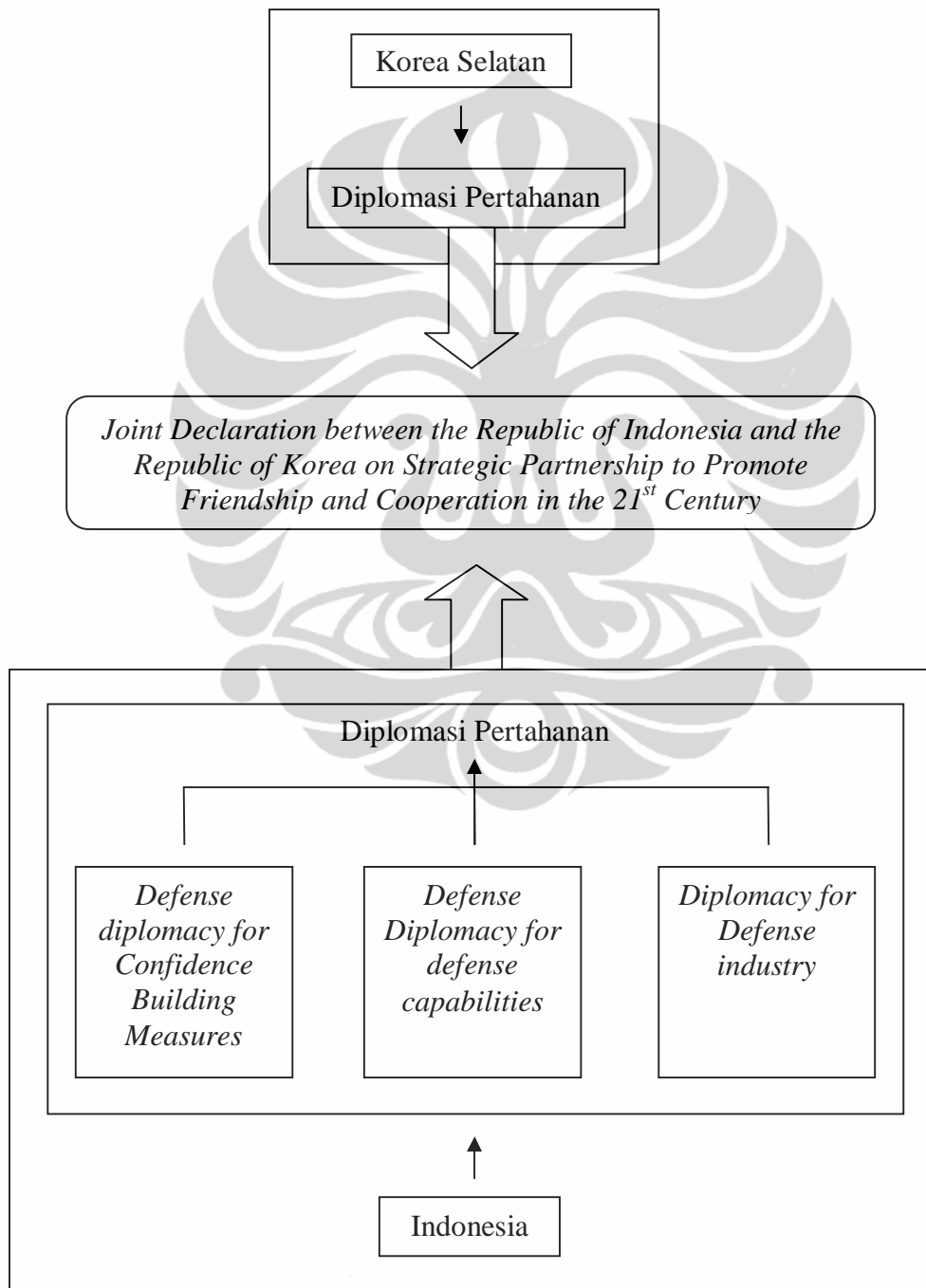
Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, yakni menggambarkan berbagai bentuk implementasi dari agenda-agenda kerjasama yang telah disepakati oleh Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan. Serta menganalisis segala hasil dari agenda deklarasi bersama tersebut baik dari sisi keberhasilan maupun dari sisi kegagalan.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif terhadap data-data yang berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Informasi yang diperoleh dituangkan dalam bahasa yang dapat menjelaskan hubungan antara data satu dengan data lainnya sehingga dapat diperoleh kebenaran atas informasi tersebut.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan dari berbagai sumber, seperti: buku, internet, majalah, jurnal, dan koran. Data sekunder merupakan data yang telah diperoleh dan diolah oleh penulis pertamanya. Data-data tersebut diperoleh dari lembaga-lembaga pemerintah seperti Kantor Kementrian Luar Negeri Indonesia,

Kantor Sekretaris Negara serta dari Perpustakaan FISIP UI, Perpustakaan Freedom Institute, Perpustakaan Jurusan FISIP UI, jaringan internet seperti www.deplu.go.id, www.bilaterals.org dan sebagainya.

I. 5. 3. Operasionalisasi Konsep



I. 5. 4. Sistematika Penulisan

Bab 1 : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab 2 : Berisi tentang gambaran umum *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* dan agenda spesifik di bidang pertahanan.

Bab 3 : Kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Korea Selatan sebelum 2006 dan periode 2006-2009.

Bab 4 : Pembahasan mengenai kepentingan pertahanan Indonesia yang terdiri dari persepsi ancaman bagi Indonesia dan kapabilitas pertahanan yang dimiliki Indonesia.

Bab 5 : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.